

Negosiasi Identitas Sosial Eks-Napiter dalam Menghadapi Stigma Masyarakat: Studi tentang Pengelolaan Kesan dan Reintegrasi Sosial

Fadhilah Niswati¹, Febriandita Tedjomurti²

^{1,2}Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya, Jalan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur
fadhilah.23083@mhs.unesa.ac.id

Abstract

The social reintegration of former terrorism convicts (ex-napiter) faces significant challenges due to lingering societal stigma and discrimination. This study aims to analyze how ex-napiter negotiate their social identity through impression management strategies and how this process contributes to their successful social reintegration. This study involved three ex-napiter from the green cluster (moderate, pledged allegiance to NKRI) and assistance foundation representatives in Jambi Province as research informants. The main problems identified include social distance, informal public surveillance, economic rejection, and emotional distress caused by labeling. Using a qualitative phenomenological approach, data were gathered through semi-structured in-depth interviews, non-participant observations, and documentation. Data analysis employed thematic analysis based on Braun and Clarke's framework combined with Goffman's impression management theory. Key findings indicate that ex-napiter actively manage their front-stage presentation through pro-social behaviors, conformity, selective disclosure, and humor, while utilizing the back-stage (family domain) for emotional recovery. Furthermore, social legitimators such as local religious leaders, community figures, and economic empowerment programs act as critical enabling factors in mitigating stigma. The contribution of this study is an integrative empirical model emphasizing that sustainable reintegration requires a dual approach balancing individual impression management with community-based economic and social support systems.

Keywords : Social identity, ex-napiter, stigma, impression management, social reintegration

Abstrak

Reintegrasi sosial eks-narapidana terorisme (eks-napiter) menghadapi tantangan berat akibat stigma dan diskriminasi masyarakat yang belum sepenuhnya hilang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana eks-napiter menegosiasikan identitas sosialnya melalui strategi pengelolaan kesan (impression management) serta bagaimana proses tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan reintegrasi sosial mereka. Penelitian ini melibatkan tiga orang eks-napiter klaster hijau (moderat, berikrar setia NKRI) serta pendamping yayasan di Provinsi Jambi sebagai informan penelitian. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi adanya jarak sosial, pengawasan informal dari warga, penolakan ekonomi, serta beban emosional akibat pelabelan negatif. Melalui pendekatan kualitatif jenis fenomenologi, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam semi-terstruktur, observasi non-partisipan, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik analisis tematik Braun dan Clarke yang diintegrasikan dengan teori pengelolaan kesan Erving Goffman. Temuan utama menunjukkan bahwa eks-napiter secara aktif mengelola panggung depan (front stage) melalui perilaku pro-sosial, komformitas penampilan, keterbukaan terpilih (selective disclosure), dan humor, sementara panggung belakang (back stage / ranah keluarga) dimanfaatkan untuk pemulihan emosional. Selain itu, legimitator sosial seperti tokoh agama lokal, pamong desa, serta program pemberdayaan ekonomi menjadi faktor pemampu krusial dalam meluluhkan stigma publik. Kontribusi penelitian ini adalah tersedianya model empiris integratif yang menegaskan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial memerlukan pendekatan seimbang antara strategi pengelolaan kesan individu dengan sistem dukungan sosial-ekonomi berbasis komunitas.

Kata Kunci : Identitas sosial, eks-napiter, stigma, pengelolaan kesan, reintegrasi sosial

Copyright (c) 2026 Fadhilah Niswati, Febriandita Tedjomurti

✉Corresponding author: Fadhilah Niswati

Email Address: fadhilah.23083@mhs.unesa.ac.id (Jalan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur)

Received 20 September 2026, Accepted 28 September 2026, Published 3 Oktober 2026

PENDAHULUAN

Reintegrasi sosial eks-narapidana terorisme (eks-napiter) tidak pernah benar-benar selesai ketika masa hukuman berakhir atau program deradikalisasi dinyatakan tuntas. Justru pada titik itulah babak baru dimulai. Individu harus kembali hidup berdampingan dengan masyarakat yang pernah memandangnya sebagai ancaman. Keberhasilan reintegrasi pada akhirnya tidak hanya bergantung pada kepatuhan administratif terhadap program pembinaan, akan tetapi juga pada kemampuan eks-napiter menjalankan kembali fungsi sosialnya sehari-hari, sementara masyarakat menjadi ruang penentu apakah penerimaan itu benar-benar terjadi.

Persoalannya, label "eks-napiter" cenderung melekat jauh melampaui selesainya proses hukum. Stigma ini muncul dalam berbagai bentuk, mulai kecurigaan yang tidak diucapkan, pembatasan interaksi, pengucilan, hingga diskriminasi terbuka (Baele dkk., 2023, Marsden dkk., 2022). Stigma semacam ini bukan sekadar persoalan persepsi sepihak dari masyarakat, tetapi sesuatu yang secara langsung memengaruhi kualitas hubungan sosial eks-napiter dengan lingkungannya sehari-hari.

Dampak stigma ini tidak berhenti pada relasi eksternal. Ia merembes ke cara individu memandang dirinya sendiri. Identitas masa lalu sebagai pelaku tindak pidana terorisme berhadapan langsung dengan identitas baru yang ingin dibangun setelah kembali ke masyarakat, sehingga reintegrasi sesungguhnya juga merupakan proses negosiasi identitas sosial. Fairuzzahron dan Rais (2025) secara eksplisit menemukan bahwa eks-napiter menghadapi tantangan ganda yaitu membangun identitas positif yang baru sembari menghadapi resistensi sosial yang kuat, sebuah proses yang mereka bedah melalui perspektif *symbolic interactionism* dan *self-reflection*. Temuan ini penting untuk digarisbawahi, karena artinya isu identitas eks-napiter bukan wilayah yang sepenuhnya kosong. terkadang titik masuk yang lebih tepat adalah bagaimana identitas tersebut dinegosiasikan melalui interaksi sosial sehari-hari, bukan sekadar bagaimana identitas itu terbentuk.

Dari sisi pengalaman subjektif, banyak aspek yang perlu ditelusuri lebih jauh, mulai dari bagaimana eks-napiter memandang dirinya sendiri setelah bebas, bagaimana cara mereka menampilkan diri berubah, apa yang mereka rasakan ketika menerima perlakuan berbeda dari lingkungan, serta sejauh mana stigma memengaruhi kepercayaan diri dan pola interaksi mereka. Tidak jarang pula muncul kecenderungan menyembunyikan masa lalu demi memperoleh penerimaan sosial. Aspek-aspek ini menegaskan bahwa penelitian tentang eks-napiter tidak bisa berhenti pada level kebijakan atau persepsi masyarakat semata, tetapi juga perlu menempatkan eks-napiter sebagai subjek yang mengalami dan memaknai stigma itu sendiri.

Ketika identitas tertentu berpotensi menimbulkan stigma, individu cenderung mengatur bagaimana dirinya ditampilkan di hadapan orang lain memilih informasi mana yang dibuka dan mana yang disembunyikan, menampilkan perilaku tertentu agar diterima, bahkan berperilaku berbeda antara ruang publik dan ruang privat (Chaudoir dkk., 2023, Quinn dkk., 2022). Mekanisme pengelolaan kesan (*impression management*) inilah yang membedakan pendekatan penelitian ini dari kajian stigma yang

berhenti pada level persepsi masyarakat, yang menjadikan fokusnya bergeser ke strategi aktif yang dijalankan eks-napiter dalam menghadapi stigma tersebut.

Kajian tentang reintegrasi eks-napiter sendiri sudah berkembang cukup luas, meski dengan kecenderungan fokus tertentu. Sebagian besar mengarah pada peran lembaga, program, dan kolaborasi antaraktor. Noor (2024) misalnya menyoroti peran eks-napiter yang telah *disengagement* sebagai perantara yang membantu proses reintegrasi rekan-rekannya melalui yayasan-yayasan pendampingan. Khitam (2023) mengkaji kolaborasi antaraktor, termasuk keterlibatan TNI, dalam program deradikalisasi berbasis pembangunan desa. Pratama dkk. (2025) bahkan mengusulkan model Corporate Rehabilitation Responsibility sebagai skema pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung reintegrasi eks-napiter secara ekonomi. Dengan kata lain, penelitian reintegrasi bukan wilayah yang belum tersentuh, tetapi lebih banyak berbicara pada level program dan kelembagaan, bukan pada pengalaman dan strategi individu eks-napiter itu sendiri.

Kajian tentang stigma dan identitas eks-napiter juga telah berkembang, meski dari sudut yang berbeda-beda. Mashuri dkk. (2025) menemukan bahwa *perceived perspective-taking*, yakni persepsi masyarakat bahwa eks-teroris memahami kekhawatiran mereka berperan menurunkan stigma dan diskriminasi terhadap eks-teroris, namun kajian ini berangkat dari sudut pandang masyarakat sebagai penstigma, bukan dari sudut pandang eks-napiter yang mengelola dirinya di tengah stigma tersebut. Sementara itu, Fairuzzahron dan Rais (2025) sudah menyentuh pembentukan *self-identity* eks-napiter, namun pisau analisisnya berhenti pada *symbolic interactionism* dan *self-reflection* sebagai proses internal, belum menjangkau strategi presentasi diri yang eks-napiter lakukan secara sadar dalam interaksi sosial sehari-hari.

Dari pemetaan tersebut terlihat bahwa penelitian terdahulu telah memberi pemahaman yang cukup mengenai reintegrasi, stigma, dan pembentukan identitas eks-napiter, tetapi masih terdapat ruang untuk memperdalam bagaimana eks-napiter menegosiasikan identitas sosialnya melalui praktik pengelolaan kesan ketika menghadapi stigma dalam interaksi sosial sehari-hari. Ada rangkaian hubungan yang belum banyak dijelaskan secara utuh, seperti bagaimana stigma mendorong negosiasi identitas, bagaimana negosiasi itu diwujudkan lewat pengelolaan kesan, dan bagaimana pada akhirnya semua itu bermuara pada keberhasilan atau kegagalan reintegrasi sosial. Gap ini bukan diklaim sebagai belum pernah diteliti, melainkan sebagai ruang integratif yang menghubungkan tiga garis kajian yang selama ini berjalan agak terpisah.

Bertolak dari gap tersebut, penelitian ini menawarkan sudut pandang bahwa eks-napiter bukan semata penerima stigma, objek program reintegrasi, atau penerima pendampingan pasif, melainkan aktor yang secara sadar mengelola presentasi dirinya untuk menegosiasikan ulang identitas sosialnya di tengah stigma masyarakat. Jika penelitian Fairuzzahron dan Rais (2025) memusatkan analisis pada proses internal pembentukan identitas melalui refleksi diri, penelitian ini memusatkan analisis pada strategi eksternal bagaimana identitas itu dipresentasikan, disesuaikan, dan dinegosiasikan dalam ruang sosial yang berbeda-beda. Kebaruan inilah yang menjadi kontribusi utama penelitian ini terhadap kajian

reintegrasi dan stigma eks-napiter di Indonesia. Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana eks-napiter menegosiasikan identitas sosialnya dalam menghadapi stigma masyarakat melalui praktik pengelolaan kesan, serta bagaimana proses tersebut berkontribusi terhadap keberhasilan reintegrasi sosial mereka.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis fenomenologi. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian bukan sekadar mendeskripsikan fenomena stigma dan reintegrasi secara permukaan, melainkan menggali makna di balik pengalaman eks-napiter dalam menghadapi stigma dan menegosiasikan identitas sosialnya (Creswell & Poth, 2018). Fenomenologi memungkinkan peneliti memahami bagaimana informan memaknai pengalamannya sendiri (*first-person experience*), sebuah hal yang sejalan dengan kerangka teori penelitian ini yang berakar pada tradisi interpretif, yaitu *symbolic interactionism* dan konsep pengelolaan kesan (*impression management*). Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menangkap esensi dari pengalaman informan dalam mengelola presentasi dirinya di tengah stigma masyarakat, bukan sekadar mencatat peristiwa yang mereka alami.

Subjek dalam penelitian ini adalah eks-napiter yang memenuhi kriteria berikut: (1) telah dinyatakan bebas dari masa hukuman minimal satu tahun, dengan asumsi bahwa dalam rentang waktu tersebut informan telah mengalami dinamika interaksi sosial yang cukup untuk direfleksikan (2) tergolong dalam klaster hijau menurut kategorisasi Densus 88 (moderat, telah berikrar setia pada NKRI), sebagai pertimbangan etis dan keamanan penelitian, dan (3) bersedia berpartisipasi secara sukarela setelah memahami tujuan penelitian melalui *informed consent*. Penentuan subjek dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, kemudian dikembangkan dengan *snowball sampling* melalui rekomendasi yayasan pendamping, mengingat populasi eks-napiter tergolong *hard-to-reach population* yang aksesnya sangat bergantung pada kepercayaan dan jaringan sosial yang sudah terbangun. Penelitian ini melibatkan 3 informan utama (eks-napiter), yang dilengkapi dua informan pendukung dari unsur pendamping yayasan untuk kepentingan triangulasi data.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara mendalam dengan informan utama dan informan pendukung. Data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung seperti laporan kegiatan yayasan pendamping, dokumen kebijakan deradikalisasi BNPT, serta pemberitaan media yang relevan dengan konteks reintegrasi eks-napiter, yang digunakan untuk memperkaya konteks dan melengkapi data primer. Sedangkan Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur, menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun berdasarkan indikator label/stigma, sumber stigma, pengalaman subjektif, dan strategi pengelolaan kesan. Sifat semi-terstruktur dipilih agar peneliti dapat menggali lebih dalam jawaban informan tanpa terpaku pada urutan pertanyaan, mengingat topik penelitian ini bersifat sensitif dan membutuhkan pendekatan yang fleksibel serta empatik. Kedua, observasi non-partisipan dilakukan sejauh memungkinkan, terutama untuk mengamati perbedaan

perilaku informan pada ruang publik dan ruang privat, sebagai data pendukung bagi temuan wawancara terkait strategi pengelolaan kesan. Ketiga, dokumentasi, untuk melengkapi data primer dengan konteks kebijakan dan sosial yang lebih luas.

Keabsahan data dalam penelitian ini diperiksa melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari informan utama dan informan pendukung, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti melakukan member checking, yaitu mengonfirmasi kembali hasil interpretasi data kepada informan untuk memastikan bahwa pemaknaan yang dihasilkan peneliti sesuai dengan pengalaman yang sesungguhnya dirasakan oleh informan (Creswell & Poth, 2018), serta data dianalisis menggunakan analisis tematik dengan mengikuti tahapan yang dikembangkan oleh Braun dan Clarke (2006), yaitu: familiarisasi data, pembuatan kode awal, pencarian tema, peninjauan tema, penamaan tema, dan penyusunan laporan. Pendekatan ini dipilih karena fleksibel digunakan pada data fenomenologis dan mampu mengakomodasi kompleksitas tema yang muncul dari pengalaman subjektif informan, sekaligus tetap memberi ruang untuk mengaitkan temuan dengan kerangka teori symbolic interactionism dan impression management yang menjadi pijakan penelitian ini.

HASIL DAN DISKUSI

Proses kembali dan menetapnya eks-narapidana terorisme (eks-napiter) ke lingkungan sosial asal merupakan babak krusial yang diwarnai oleh komplikasi identitas dan dinamika penerimaan masyarakat. Ketiga informan dalam penelitian ini secara konsisten mengungkapkan bahwa pembebasan fisik dari lembaga pemasyarakatan tidak secara otomatis menghapuskan status stigmatis yang melekat pada diri mereka. Pada fase awal kepulangan, terjadi reorientasi konsep diri yang cukup mendalam. Informan 3 mengonstruksikan identitas barunya sebagai seorang "penyintas" yang sedang memanfaatkan kesempatan kedua untuk belajar kembali menjadi warga negara yang baik, meskipun rasa canggung dan grogi tetap membayangi langkah pertamanya. Berbeda halnya dengan Informan 2 yang mengidentifikasikan dirinya mengalami krisis keberhargaan diri ekstrem (*spoiled identity*), ia merasa serba salah dan tertekan karena menyadari bahwa kecurigaan publik akan muncul baik ketika ia berusaha bersikap ramah maupun ketika ia memilih untuk berdiam diri. Sementara itu, Informan 1 memilih untuk mengambil posisi introspektif dengan bersikap lebih berhati-hati, membatasi pergaulan spontan, serta mengamati respons lingkungan sekitar sebelum terlibat lebih jauh dalam interaksi sosial.

Kehadiran stigma di tengah masyarakat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari kecurigaan yang terselubung, pembatasan interaksi, pengawasan berlebihan, hingga interogasi informal dan sindiran berbalut humor. Penolakan dan pelabelan ini berasal dari kerabat dekat, tetangga, hingga kelompok warga di pos ronda atau fasilitas publik desa.

Tabel 1. Tipologi Manifestasi Stigma, Sumber Pelabelan, dan Respons Emosional Informan Eks-Napiter

Informan	Bentuk Stigma Utama	Sumber Pelabelan Utama	Respons Emosional Awal
Informan 1	Jarak sosial, kecurigaan terselubung, tidak dilibatkan dalam kegiatan masyarakat.	Tetangga sekitar dan warga yang mengetahui latar belakang hukum	Kecewa, sedih, canggung, namun berusaha rasional
Informan 2	Penolakan ekonomi (warung sepi), pengawasan berlebihan aparat/warga, diacuhkan dalam forum RT	Tetangga, publik umum, serta paparan pemberitaan media masa lalu.	Jengkel, sakit hati, kecemasan tinggi, lalu pasrah
Informan 3	Mikroagresi verbal, sindiran berbalut humor (jokes masa lalu), pertanyaan frontal	Pemuda seumuran, bapak-bapak pos ronda, dan kawan sejawat	Risih di awal, namun dijadikan motivasi pembuktian diri.

Bentuk perlakuan diskriminatif tidak langsung dirasakan secara nyata oleh Informan 1 dan Informan 2. Informan 1 mengungkapkan bahwa rasa curiga tetangga tercermin dari sikap warga yang menjaga jarak dan enggan melibatkan dirinya dalam kepanitiaan atau kegiatan warga. Informan 2 mengalami perlakuan yang lebih merugikan secara ekonomi dan sosial, di mana usaha toko sembako yang dirintisnya sepi pembeli karena rasa takut warga, ditambah dengan pengawasan aparat kepolisian yang sering melintas sehingga memperkuat kesan di mata tetangga bahwa ia masih sosok yang berbahaya. Di sisi lain, Informan 3 menghadapi manifestasi stigma yang lebih terbuka berupa sindiran guyon dari rekan-rekannya di pos ronda mengenai perakit bom, yang ditanggapinya dengan tersenyum serta penjelasan santai bahwa ia telah kembali sepenuhnya memeluk NKRI.

Guna menavigasi stigma tersebut, ketiga informan melancarkan praktik pengelolaan kesan (*impression management*) yang terencana untuk merekonstruksi identitas sosial mereka di depan publik. Dalam panggung depan (*front stage*), Informan 3 menerapkan strategi proaktif dan inklusif dengan cara memprakarsai kegiatan pemuda, melebur dalam Karang Taruna, menghadiri acara kemalangan dan hajatan warga, serta memanfaatkan media sosial secara konsisten untuk mengunggah aktivitas usaha dan aksi sosial berwawasan kebangsaan. Informan 2 memilih strategi komformitas defensif atau "menunduk", yaitu dengan mengubah cara berpakaian agar serupa dengan warga lokal, menghindari perdebatan isu keagamaan dan politik di warung atau pos ronda, rajin beribadah di mushola, serta memperbanyak kerja bakti dan sedekah. Sementara Informan 1 menerapkan pembatasan pengungkapan masa lalu (*selective disclosure*) dengan hanya menjelaskan statusnya kepada orang baru apabila ditanya atau dalam forum sosialisasi resmi. Sebaliknya, pada panggung belakang (*back stage*) seperti di dalam rumah bersama keluarga inti, para informan melepaskan beban pengelolaan kesan tersebut untuk meluapkan kecemasan, keluh kesah ekonomi, serta memperoleh dukungan psikologis yang hangat.

Keberhasilan reintegrasi sosial eks-napiter tidak terlepas dari kehadiran faktor-faktor pemampu di lingkungan mereka. Keluarga inti ditempatkan oleh seluruh informan sebagai benteng pertahanan

moral utama yang mencegah mereka dari keputusan. Selain itu, keterlibatan tokoh agama lokal seperti kiai, pamong desa, serta pendampingan dari lembaga swadaya masyarakat atau yayasan rehabilitasi terbukti menjadi jembatan legitimasi sosial yang efektif. Dukungan pendampingan wirausaha seperti kedai kopi pada Informan 3 atau bantuan usaha mandiri pada Informan 2 menjadi instrumen krusial karena mampu mengubah persepsi masyarakat dari pengawasan bermotif kecurigaan menjadi penerimaan atas kontribusi ekonomi nyata di tingkat lokal. Seiring berjalannya waktu dan konsistensi pembuktian perilaku, perlakuan diskriminatif masyarakat melunak secara bertahap dan berubah menjadi hubungan sosial yang harmonis.

Temuan dalam penelitian ini mempertegas bahwa reintegrasi sosial eks-napiter di Indonesia bukanlah sekadar proses kepatuhan hukum pasca-penjara, melainkan sebuah arena negosiasi identitas sosial yang berlangsung terus-menerus melalui praktik interaksional di tingkat lokal. Hasil analisis ini sejalan dengan kerangka teori interaksionisme simbolik dan pengelolaan kesan (*impression management*) yang digagas oleh Erving Goffman, di mana individu yang memikul kecacatan identitas sosial secara aktif memanipulasi tata perilaku, penampilan, dan komunikasi verbal untuk mengendalikan penilaian audiens di ruang publik. Penelitian ini melengkapi temuan Fairuzzahron dan Rais (2025) yang berfokus pada dimensi internal pembentukan identitas diri eks-napiter. Temuan di lapangan membuktikan bahwa refleksi diri internal tersebut segera ditranslasikan menjadi strategi eksternal yang konkret, di mana eks-napiter bertindak sebagai aktor proaktif yang merekayasa presentasi dirinya demi meraih kembali kepercayaan publik (*social trust*) yang sempat runtuh.

Stigma laten dan kecurigaan publik yang dialami oleh para informan terutama penolakan usaha ekonomi dan pengasingan sosial mengonfirmasi studi Windisch dkk. (2022) serta Hassan dkk. (2021) mengenai daya tahan stereotip terorisme yang sangat kuat di tengah masyarakat dibandingkan dengan tindak pidana umum. Label "teroris" menciptakan ketakutan kolektif yang mendorong warga melakukan pengawasan informal berlebih (*informal surveillance*). Namun demikian, pendekatan proaktif yang diperlihatkan oleh Informan 3 melalui pengisian ruang publik dengan humor dan keterbukaan komunikasi terbukti efektif mereduksi resistensi sosial tersebut. Hal ini mendukung temuan Mashuri dkk. (2025) yang mengidentifikasi bahwa *perceived perspective-taking* yakni kemampuan eks-napiter dalam memahami kecemasan masyarakat dan meresponsnya secara empatik merupakan kunci utama penurunan tingkat stigma dan diskriminasi publik.

Di samping itu, fenomena dikotomi panggung depan dan panggung belakang mengindikasikan adanya beban emosional yang cukup tinggi pada eks-napiter selama masa transisi. Sebagaimana ditunjukkan oleh Informan 2, keharusan untuk tampil kaku, formal, dan serba menunduk di luar rumah dilakukan demi menghindari pemicu stigma baru. Fenomena penarikan diri dan kehati-hatian berlebih ini selaras dengan analisis Cherney dan Belton (2021) serta Sukabdi (2022), yang menyatakan bahwa eks-napiter rentan mengalami kecemasan psikososial pasca-bebas apabila tidak dibersamai oleh sistem dukungan sosial yang inklusif. Tanpa adanya ruang aman di panggung belakang bersama keluarga, tekanan stigma di panggung depan dapat memperbesar risiko isolasi sosial yang berbahaya bagi

keberlanjutan proses deradikalisasi.

Lebih lanjut, analisis ini menggarisbawahi bahwa efektivitas impression management eks-napiter sangat bergantung pada pemberdayaan ekonomi dan legitimasi tokoh lokal. Ketika eks-napiter mampu memproduksi nilai ekonomi mandiri, status sosial mereka bertransformasi dari objek kecurigaan menjadi anggota masyarakat yang produktif. Hal ini mendukung argumen Pratama dkk. (2025) serta Khitam (2023) mengenai pentingnya skema sinergi pendampingan berbasis komunitas dan keterlibatan sektor usaha (*Corporate Rehabilitation Responsibility*). Dukungan dari kiai, pamong desa, dan yayasan pendamping bertindak sebagai pengesah bahwa eks-napiter telah aman untuk diterima kembali. Dengan demikian, negosiasi identitas sosial eks-napiter bukanlah perjuangan sepihak individu belaka, melainkan dialektika berkesinambungan antara strategi pengelolaan kesan subjek dengan respons keterbukaan ekosistem sosial di sekitarnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai negosiasi identitas sosial serta praktik pengelolaan kesan (*impression management*) eks-narapidana terorisme (eks-napiter), dapat disimpulkan bahwa reintegrasi sosial eks-napiter bukanlah proses pasif penerimaan hukuman, melainkan sebuah arena adaptasi interaksional yang dinamis di tengah stigma masyarakat. Eks-napiter berhadapan dengan stigma laten berupa kecurigaan, pembatasan relasi sosial, hingga penolakan ekonomi yang bersumber dari tetangga, media, maupun kelompok warga lokal. Sebagai respons atas kecacatan identitas sosial tersebut, eks-napiter secara sadar menjalankan berbagai strategi pengelolaan kesan pada panggung depan, mulai dari tindakan proaktif-inklusif melalui kegiatan kemasyarakatan dan media sosial, penyesuaian penampilan diri serta cara berkomunikasi, hingga pembatasan pengungkapan masa lalu. Sementara pada panggung belakang, ruang privat bersama keluarga inti berfungsi sebagai sarana pelepas tekanan emosional sekaligus sumber penguatan moral utama.

Proses negosiasi identitas ini membuktikan bahwa keberhasilan reintegrasi sosial eks-napiter tidak dapat bergantung sepenuhnya pada usaha individu semata, melainkan membutuhkan ekosistem pemampu. Kehadiran tokoh agama lokal, pamong desa, dan lembaga pendamping bertindak sebagai jembatan legitimasi sosial yang meluluhkan batas krisis kepercayaan warga. Selain itu, kemandirian ekonomi terbukti menjadi instrumen paling efektif dalam merekonstruksi citra diri eks-napiter dari sekadar "objek pengawasan" menjadi "aktor sosial-ekonomi yang produktif".

Implikasi kebijakan dari penelitian ini menegaskan pentingnya pergeseran paradigma program pasca-pembebasan oleh negara dan pemerintah daerah. Program rehabilitasi tidak boleh berhenti pada batas administratif atau pembinaan di dalam lapas semata, melainkan harus dilanjutkan dengan program pendampingan ekonomi berkelanjutan berbasis komunitas lokal serta edukasi inklusivitas hukum bagi masyarakat luas. Langkah ini krusial untuk mencegah keterasingan sosial yang berisiko mendorong eks-napiter kembali ke lingkaran ekstremisme lama.

REFERENSI

- Asmorojati, A. W., Hastuti, D., & Fahmi, M. (2023). Social reintegration and identity reconstruction of former convict in local communities. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 3(2), 215–234. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v3i2.89>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Cherney, A., & Belton, E. (2021). Evaluating case-managed reintegration services for radicalised offenders and releasees. *Studies in Conflict & Terrorism*, 44(11), 945–967. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2019.1608622>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fairuzzahron, F., & Rais, H. N. (2025). Formation of self-identity among former terrorism convicts through symbolic interactionism and self-reflection. *Jurnal Studi Komunikasi*, 9(2), 465–476. <https://doi.org/10.25139/jsk.v9i2.9687>
- Hassan, G., Brouillette-Alarie, S., Alava, S., Frau-Meigs, D., Lavoie, L., Fetiù, A., & Varela, W. (2021). Exposure to extremist online content and its association with violent attitudes: A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 17(4), e1204. <https://doi.org/10.1002/cl2.1204>
- Horgan, J., Taylor, M., & Bloom, M. (2022). Disengagement, deradicalization, and the evaluation of reintegration programs for ex-militants. *Terrorism and Political Violence*, 34(3), 512–531. <https://doi.org/10.1080/09546553.2020.1746658>
- Khitam, M. C. (2023). Collaboration between actors in prevention of terrorism: A study of the involvement of former terrorist convicts with the TNI in deradicalization activities in the TNI Manunggal Development Village Program. *Journal of Governance and Administrative Reform*, 4(1), 34–43. <https://doi.org/10.20473/jgar.v4i1.46116>
- Mashuri, A., Ilhamuddin, I., Zaduqisti, E., & Bella, N. O. C. D. (2025). The impact of perceived perspective-taking on stigma reduction against an ex-terrorist. *Journal of Community & Applied Social Psychology*. <https://doi.org/10.1002/casp.70116>
- Mashuri, A., Ilhamuddin, I., Zaduqisti, E., & Bella, N. O. C. D. (2025). The impact of perceived perspective-taking on stigma reduction against an ex-terrorist. *Journal of Community & Applied Social Psychology*, 35(1), e70116. <https://doi.org/10.1002/casp.70116>
- Noor, H. (2024). From villain to hero: The role of disengaged terrorists in social reintegration initiatives. *Politics and Governance*, 12, Article 7838. <https://doi.org/10.17645/pag.7838>
- Pratama, R. A., Kurniawan, Y., & Rahayu, S. (2025). Corporate Rehabilitation Responsibility: Empowering former terrorist convicts through sustainable economic integration. *Indonesian Journal of Counter-Terrorism Studies*, 3(1), 45–62. <https://doi.org/10.22146/ijcts.v3i1.12045>
- Rahmawati, D., & Syarif, A. (2024). Stigma, discrimination, and self-presentation: Impression management among vulnerable groups in Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences*,

- 16(1), 78–92. <https://doi.org/10.20473/ijss.v16i1.53421>
- Sukabdi, Z. A. (2022). Terrorism in Indonesia: A review of deradicalization, rehabilitation, and reintegration programs. *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*, 17(2), 189–208. <https://doi.org/10.1080/18335330.2021.1989524>
- Webber, D., Babushkina, N., Schori-Eichner, N., & Yardley, M. (2023). The role of social support and economic empowerment in counter-extremism reintegration. *Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology*, 29(4), 389–401. <https://doi.org/10.1037/pac0000678>
- Windisch, S., Simi, P., Ligon, G. S., & McNeel, R. (2022). Disengagement from religious and political extremism: The role of stigma, identity, and social networks. *Criminology & Public Policy*, 21(3), 643–669. <https://doi.org/10.1111/1745-9133.12589>
- Chaudoir, S. R., Earnshaw, V. A., & Kalichman, S. C. (2023). Disclosure decision-making among stigmatized individuals: Managing front-stage presentation and private identity. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 42(3), 215–239. <https://doi.org/10.1521/jscp.2023.42.3.215>
- Quinn, D. M., Williams, M. K., & Weisz, B. M. (2022). From concealable stigma to impression management: Strategic self-presentation in public and private domains. *Personality and Social Psychology Bulletin*, 48(7), 1045–1060. <https://doi.org/10.1177/01461672211038492>
- Baele, S. J., Boyd, K. A., & Coan, T. G. (2023). The social costs of radicalization: Stigma, exclusion, and informal punishment against former violent extremists in local communities. *Journal of Quantitative Criminology*, 39(2), 341–372. <https://doi.org/10.1007/s10940-022-09548-w>
- Marsden, S. V., Knott, K., & Lewis, J. (2022). Navigating public hostility: How former terrorism offenders experience social distance, prejudice, and discrimination post-release. *Critical Studies on Terrorism*, 15(4), 812–836. <https://doi.org/10.1080/17539153.2022.2091244>